RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL TAHUN 2024

DINAS SOSIAL

KABUPATEN ASAHAN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Asahan 2021-2026 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan sosial selama periode 2021-2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan sosial. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2024). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Sosial pada akhir tahun anggaran 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor pembangunan sosial Kabupaten Asahan.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KAB.ASAHAN

ASRUL [illegible], SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19670421 199203 1 008

DAFTAR ISI

BAB I. : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……..1

1.1.1 Pengertian Renja ……....1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja ……..... 2

1.1.3 Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen Perencanaan lainnya …….. …3

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan. 6

BAB II. : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun Lalu 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 8

2.2.1 Program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan kegiatan ……8

2.2.2 Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial..... 9

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 10

BAB III. : TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten/Kota .. 13

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 13

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah 14

BAB IV. : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024..... 15

BAB V. : PENUTUP..... 18

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 63/SK-DINSOS.AS/VIII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023.

KESATU : Renja Dinas Sosial Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Sosial Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : Juli 2023.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ASAHAN,

ASRUL WAHID, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP.19670421 199203 1 008

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good govermance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintah yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented goverman). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan daerah dalam priode satu tahun berjalan dengan efektif, efesien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah melalui perda Nomor 34 tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Asahan menyusun Dokumen Renja 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Asahan.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Sosial Kabupaten Asahan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut. Dengan adanya RENJA ini, Diharapkan sektor Sosial Kabupaten Asahan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator,dan katalisator dalam maningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen Perencanaan OPD untuk Priode satu tahun. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diwajibkan Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama 1(satu) tahun dan berfungsi Untuk manerjemahkan perencanaan strategis Lima Tahun yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih Operasional. Dinas Sosial Kabupaten Asahan Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau (OPD) di Kabupaten Asahan yang mempunyai tugas melaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Dibidang Sosial sesuai Peraturan BUPATI ASAHAN Nomor 34 Tahun 2016.

Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Sosial Kabuapten Asahan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan ekfektif dan terarah, maka penyusunan dan penerapan Renja OPD menjadi mutlak yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan Prioritas OPD pada Tahun Anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD, mengacuh pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat di kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja kerja terhadap penyampaian terhadap Renstra OPD. Tahap penerapan rancangan akhir Rencana kerja OPD dilkakukan dengan Pengesahan Oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD, dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Subsutansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan RKPD.
2. Progran dan Kegiatan di rinci menurut sumber perdanaan yang diusulkan.
3. Program yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,target nyampaian program/kegiatan,target keluaran,total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja OPD Merupakan Dokumen Resmi Program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam Tahun Rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD telah memperhatikan Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai Berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim penyusun Renja
   - Orientasi Mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
   - Pengumpulan Data dan Impormasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi imformasi yang lebih terstruktur,sistematis,dan

relevan bagi pembahasan Tim dan Pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan Data dan Informasi;
- Analisis gambaran Pelayanan OPD;
- Mereview hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD 1 tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- Verifikasi dan penyempumaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
- Penetapan Renja.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, yang merupakan sebuat proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sestematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lain nya. Sehingga tidak ditemukan lagi perbedaan antara keduanya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3)

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 24).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Asahan adalah untuk :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan , strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah yang mendasar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Sosial Kabupaten Asahan terdiri beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kondisi pelayanan Dinas Sosial saat ini dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan berbagai aspek yang ada yang menjadi kewenangan/tupoksi Dinas Sosial termasuk tentang keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN

Bab ini berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diingikan.

BAB V PENUTUP

Berisi harapan Kepala Dinas Sosial terhadap peningkatan pelayanan Dinas Sosial , serta perlunya program/kegiatan transisi untuk menjaga keberlanjutan pelayanan tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

OPD mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu " Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bebasis IMTAQ, Meningkatkan pelayanan dan kesadaran kesehatan masyarakat, Mendorong terciptanya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat "sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015, tentang Penilaian Rata-Rata Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja meliputi :

Tabel 1 . Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	**Interval Nilai Realisasi Kinerja**	**Kriteria Penelitian Realisasi Kinerja**
1	**2**	**3**
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 2. Evaluasi Hasil Renja Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2022

No.	Program	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022		Peridikat
			Keuangan	Persentase	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.383.887.777	4.328.873.083	98.75	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Sosial	423.494.601	394.434.488	93.14	Sangat Tinggi
3	Program Rehabilitasi Sosial	463.307.081	387.762.500	83.69	Tinggi
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.450.494.125	2.357.722.740	96.21	Sangat Tinggi
5	Program Penanganan Bencana	282.280.375	243.239.575	86.17	Tinggi
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	70.853.401	66.393.251	93.71	Sangat Tinggi
Jumlah ……		**8.074.317.360**	**7.778.425.637**	**96.34**	**Sangat Tinggi**

Evaluasi hasil Renja bertujuan untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan anggaran program / kegiatan dalam Renja untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022.

Evaluasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan Renja Tahun 2022 secara rinci tertera pada Lampiran I diakhir buku Renja ini. Dan secara umum realisasi anggaran masing-masing program tertera pada Tabel diatas.

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada DINAS SOSIAL yang melaksanakan 6 program secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2022 mencapai 96.34 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran DINAS SOSIAL berada pada kriteria Sangat Tinggi.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.2.1 Program Yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan kegiatan

Capaian kinerja Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022 di kriteria penelitian realisasi kinerja sangat tinggi yaitu 98.75 %, Program Pemberdayaan Sosial tahun 2022 di kriteria penelitian realisasi kinerja sangat tinggi yaitu 93.14%, Program Rehabilitasi Sosial tahun 2022 di kriteria penelitian realisasi kinerja tinggi yaitu 83.69%, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2022 dikriteria sangat tinggi yaitu 96.21%, Program Penanganan Bencana tahun 2022 dikriteria penelitian realisasi kinerja tinggi yaitu 86.17% dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tahun 2022 dikriteria penelitian realisasi kinerja sangat tinggu yaitu 93,71%, hal ini disebabkan karena masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan mengingat adanya kendala.

2.2.2 Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Asahan yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Asahan 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026.

NO.	INDIKATOR	TARGET			REALISASI CAPAIAN
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2022
1	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mancapai tujuan, maka Dinas Sosial Kabupaten Asahan menetapkan sasaran kinerja yang merupaka acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu paramater yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang memperoleh dari pengukuran yan dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungís Dinas Sosial Kabupaten Asahan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan sebagai berukut :

1. Pemahaman aparatur di tingkat kecamatan dan desa terhadap permasalahan kesejahteraan sosial masih rendah
2. Pengetahuan kelompok masyarakat tentang tata cara pengembangan bantuan yang diberikan masih rendah
3. Kualitas Data
4. Bantuan yang kurang tepat sasaran
5. Kurangnya Sumber Daya manusia

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Hasil Musrembang Tk. Kelurahan / Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dapat diambil beberapa usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5) Fasilitasi kujungan tamu
6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan
2) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

A. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

B. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah kabupaten/kota

1) Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
2) Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4) Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial kelembagaan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

3. Program Rehabilitasi Sosial

A. Rehabilitasi Sosial dasar peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta galandangan pengemis di luar panti social

1) Penyediaan permakanan
2) Penyediaan sandang
3) Penyediaan alat bantu
4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social
6) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
7) Pemberian layanan data dan pengaduan
8) Pemberian layanan kedaruratan

B. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti

1) Pemberian layanan rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

A. Pemeliharaan anak-anak terlantar

1) Penjangkauan anak-anak terlantar
2) Rujukan anak-anak terlantar
3) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

B. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

1) Pendataa fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
2) Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga
3) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

A. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

1) Penyediaan makanan
2) Penyediaan sandang

B. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

1) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
2) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

A. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

1) Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
2) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan Kementerian Sosial RI dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah Mensinkronisasi Program Pengembangan SDM, Lembaga dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024.

Telaahan terhadap Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Asahan

a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral dan masyarakat menangani PMKS
b. Meningkatkan peran dan kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial, akses pemenuhan kebutuhan dasar warga, kualitas pengelolaan sumber dana bansos, serta penguatan nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
c. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah dan peran serta pengusaha dan masyarakat untuk peduli kepada PMKS
d. Peningkatan kualitas hidup dan akses seluas – luasnya bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar
e. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat berbasis masyarakat

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa akan datang yang ingin dicapai.

Visi OPD adalah gambaran arah dan kebijakan pembangunan atau kondisi keadaan masa akan datang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dimana Visi harus jelas menggambarkan dan menunjukkan apa yang menjadi harapan dan cita – cita layanan terbaik OPD, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana OPD hendak dibawa. Gambaran ke depat tersebut, dibangun melalui tahapan dan proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Oleh sebab itu, berawal dari harapan dan cita – cita yang ingin mewujudkan dengan didukung peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), elemen – elemen OPD dan memperhatikan nilai – nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang turut serta mempengaruhi, maka dirumuskan Visi Dinas Sosial Kabupaten Asahan adalah :

” Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat ”.

Visi di atas bermaksud,untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat dalam tingkat kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan serta mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam kehidupannya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penjabaran visi yang telah dibuat. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan adalah :

Misi

1. Meningkatkan dan Memperkuat Stabilitas Sosial dan Integrasi Sosial Melalui Pembinaan Semangat Kesetikawanan Sosial serta Nilai-nilai Kejuangan, Keperintisan dan Kepeloporan
2. Meningkatkan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial,melalui rehabilitasi,pelayanan,jaminan dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin
3. Meningkatkan peran aktif potensi sumber kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan Peranan Dunia Usaha dan Industri Dalam Penanggulangan Masalah Sosial
5. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Searah dan sejalan dengan misi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

“ Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat”

Dalam meningkatkan upaya pencapaian tujuan di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Asahan memiliki sasaran – sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud di atas. Sasaran – sasaran tersebut yaitu :

1. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1	Meningkatkan derajat Ekonomi Masyarakat	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Kategori Miskin Yang Ditingkatkan Kompetensinya	0,40 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4. 1 Rencana Kerja Dinas Sosial 2024

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Asahan merencanakan 6 program yang berkaitan dengan bidang sosial, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daera Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Fasilitasi kujungan tamu
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

A. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

B. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah kabupaten/kota

1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
2. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial kelembagaan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

3. Program Rehabilitasi Sosial

A. Rehabilitasi sosial dasar peyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta galandangan pengemis di luar panti social

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan sandang
3. Penyediaan alat bantu
4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social
6. Pemberian layanan kedaruratan

B. Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainya bukan korban HIV/AIDS dan napza di luar panti

1. Pemberian layanan rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

A. Pemeliharaan anak-anak terlantar

1. Penjangkauan anak-anak terlantar
2. Rujukan anak-anak terlantar
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar

B. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

1. Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga
2.. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

A. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

1. Penyediaan makanan
2. Penyediaan sandang
3. Pelayanan dukungan psikososial

B. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota

1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

A. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

1. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
2. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Asahan Tahun 2024 mengacu pada visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Renja ini disusun dengan tujuan agar dapat menjadi tolok ukur dan menjawab serta memfokuskan upaya Dinas Sosial Kabupaten Asahan menghadapi tantangan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan supaya dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras dari tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Sosial Kabupaten Asahan dalam meningkatkan derajat kesejahteraan sosial di Kabupaten Asahan.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. ASAHAN

ASRUL WAHID, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19670421 199203 1 008

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
	DINAS SOSIAL			**6,945,995,212**
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
01.00	**DINAS SOSIAL**			
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100%**	**4,656,221,249**
1.06.01.2.01	**Kegiatan** (Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**15 Dokumen**	**49,484,300**
1.06.01.2.01.01	**Sub Keg** (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	10,826,000
1.06.01.2.01.02	**Sub Keg** (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,258,600
1.06.01.2.01.03	**Sub Keg** (Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuanan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0
1.06.01.2.01.06	**Sub Keg** (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	6,238,900
1.06.01.2.01.07	**Sub Keg** (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	27,160,800
1.06.01.2.02	**Kegiatan** (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	**2,425,114,231**
1.06.01.2.02.01	**Sub Keg** (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	2,425,114,231
1.06.01.2.03	**Kegiatan** (Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah)	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	100%	
1.06.01.2.03.07	**Sub Keg** (Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD)	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	
1.06.01.2.05	**Kegiatan** (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	
1.06.01.2.05.02	**Sub Keg**(Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket (24 Stel)	
1.06.01.2.06	**Kegiatan** (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	**100%**	**295,967,873**
1.06.01.2.06.01	**Sub Keg**(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	32,017,250
1.06.01.2.06.02	**Sub Keg**(Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	83,121,501
1.06.01.2.06.03	**Sub Keg**(Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	
1.06.01.2.06.04	**Sub Keg**(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	
1.06.01.2.06.05	**Sub Keg**(Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disedaikan	15 Paket	45932222
1.06.01.2.06.06	**Sub Keg**(Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	9,927,000
1.06.01.2.06.07	**Sub Keg**(Fasilitasi Kunjungan Tamu)	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	24,969,900

1.06.01.2.06.09	**Sub Keg**(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000
1.06.01.2.07	**Kegiatan** (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	**255,875,000**
1.06.01.2.07.05	**Sub Keg**(Pengadaan Mebel)	Jumlah paket mebel yang disediakan	7 unit	
1.06.01.2.07.06	**Sub Keg**(Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	171,000,000
1.06.01.2.07.10	**Sub Keg**(Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	84,875,000
			1062528000	
1.06.01.2.08	**Kegiatan** (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	12 Laporan	**1,192,871,045**
1.06.01.2.08.01	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	4,992,000
1.06.01.2.08.02	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	98,141,045
1.06.01.2.08.03	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	27,210,000
1.06.01.2.08.04	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1,062,528,000
1.06.01.2.09	**Kegiatan** (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	**436,908,800**
1.06.01.2.09.01	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan)	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 Unit	211,544,800
1.06.01.2.09.02	**Sub Keg**(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1.06.01.2.09.05	**Sub Keg**(Pemeliharaan Mebel)	Jumlah mebel yang dipelihara	7 Unit	
1.06.01.2.09.06	**Sub Keg**(Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	
1.06.01.2.09.09	**Sub Keg**(Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 Unit	128,934,000
1.06.01.2.09.10	**Sub Keg**(Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	56,430,000
1.06.01.2.09.11	**Sub Keg**(Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	40,000,000
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial**	**100%**	**563,893,410**
1.06.02.2.02	**Kegiatan** (Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Sumbangan dalam daerah yang terkoordinir	**1 Dokumen**	**13,998,900**
1.06.02.2.02.01	**Sub Keg** (Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/ Barang	1 Dokumen	13,998,900
1.06.02.2.03	**Kegiatan** (Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota)	Terlaksananya Pengembangan Potensi SDM Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/kota.	99 orang	**549,894,510**
1.06.02.2.03.01	**Sub Keg** (Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota)	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 orang	
1.06.02.2.03.02	**Sub Keg** (Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabuapten/kota)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapsitasnya	25 orang	25,500,000
1.06.02.2.03.03	**Sub Keg** (Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota)	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	66,042,250

1.06.02.2.03.04	**Sub Keg** (Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 lembaga	428,352,260
1.06.02.2.03.05	**Sub Keg** (Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus	30,000,000
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**100%**	
1.06.03.2.01	**Kegiatan** (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal)	Terlaksananya Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan dari titi daerah kabupaten ke desa/kelurahan asal	12 orang	
1.06.03.2.01.01	**Sub Keg** (Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentasi masyarakat yang menerima rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten/kota**	**100%**	**762,568,450**
1.06.04.2.01	**Kegiatan** (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial)	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	**12 Bulan**	**718,194,950**
1.06.04.2.01.01	**Sub Keg** (Penyediaan permakanan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	89,336,900
1.06.04.2.01.02	**Sub Keg** (Penyediaan sandang)	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	66,855,400
1.06.04.2.01.03	**Sub Keg** (Penyediaan alat bantu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	523 Orang	175,000,000
1.06.04.2.01.04	**Sub Keg** (Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	122 Orang	65,715,650
1.06.04.2.01.05	**Sub Keg** (Pemberian bimbingan fisik, mental , spiritual, dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	39,409,000
1.06.04.2.01.06	**Sub Keg** (Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	74,174,500
1.06.04.2.01.07	**Sub Keg** (Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak)	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16,822,000
1.06.04.2.01.08	**Sub Keg** (Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	8,285,000
1.06.04.2.01.09	**Sub Keg** (Pemberian pelayanan data dan pengaduan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	8,736,600
1.06.04.2.01.10	**Sub Keg** (Pemberian layanan kedaruratan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	81,878,000
1.06.04.2.01.11	**Sub Keg** (Pemberian pelayanan penelusuran keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	60,312,900

1.06.04.2.01.12	**Sub Keg** (Pemberian layanan rujukan)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	31,669,000
1.06.04.2.02	**Kegiatan** (Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial)	Persentase Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12 Bulan	**44,373,500**
1.06.04.2.02.01	**Sub Keg** (Pemberian layanan data dan pengaduan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	
1.06.04.2.02.02	**Sub Keg** (Pemberian layanan kedaruratan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	
1.06.04.2.02.03	**Sub Keg** (Penyediaan permakanan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang X 3x Makan X 12 Bulan	
1.06.04.2.02.04	**Sub Keg** (Penyediaan sandang)	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
1.06.04.2.02.05	**Sub Keg** (Penyediaan alat bantu)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	523 Orang	
1.06.04.2.02.06	**Sub Keg** (Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	
1.06.04.2.02.07	**Sub Keg** (Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	
1.06.04.2.02.08	**Sub Keg** (Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA)	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	
1.06.04.2.02.09	**Sub Keg** (Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akte kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak)	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	
1.06.04.2.02.10	**Sub Keg** (Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	
1.06.04.2.02.11	**Sub Keg** (Pemberian palayanan penelusuran keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	
1.06.04.2.02.12	**Sub Keg** (Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	122 Orang	
1.06.04.2.02.13	**Sub Keg** (Pemberian layanan rujukan)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	44,373,500
1.06.04.2.02.14	**Sub Keg** (Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitas sosial kabupaten/kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial**	**63,98%**	**427,227,950**
1.06.05.2.01	**Kegiatan** (Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar)	Terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar	**50 orang**	**64,607,500**
1.06.05.2.01.01	**Sub Keg** (Penjangkauan anak-anak terlantar)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	24,607,500
1.06.05.2.01.02	**Sub Keg** (Rujukan anak-anak terlantar)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20,000,000
1.06.05.2.01.03	**Sub Keg** (Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20,000,000

1.06.05.2.02	**Kegiatan** (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Terlaksananya pendataan dan pemberian bantuan terhadap fakir miskin cakupan kabupaten/kota.	63.597 KK	**362,620,450**
1.06.05.2.02.01	**Sub Keg** (Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	63.597 orang	
1.06.05.2.02.02	**Sub Keg** (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	63.597 KK	
1.06.05.2.02.03	**Sub Keg** (Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.230 keluarga	208,763,450
1.06.05.2.02.04	**Sub Keg** (Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	153,857,000
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Yang menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**	**100%**	**361,695,280**
1.06.06.2.01	**Kegiatan** (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 orang	**330,698,780**
1.06.06.2.01.01	**Sub Keg** (Penyediaan makanan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	196,385,530
1.06.06.2.01.02	**Sub Keg** (Penyediaan Sandang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	134,313,250
1.06.06.2.01.03	**Sub Keg** (Penyedian tempat penampungan pengungsi)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	
1.06.06.2.01.04	**Sub Keg** (Penanganan khusus bagi kelompok rentan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	
1.06.06.2.01.05	**Sub Keg** (Pelayanan dukungan psikososial)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	107 orang	
1.06.06.2.02	**Kegiatan** (Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota)	Cakupan pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana	8 kampung	**30,996,500**
1.06.06.2.02.01	**Sub Keg** (Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	204 Kampung	20,441,300
1.06.06.2.02.02	**Sub Keg** (Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	10,555,200
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik**	**100%**	**174,388,873**
1.06.07.2.01	**Kegiatan** (Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota)	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota .	**2 paket**	**174,388,873**
1.06.07.2.01.01	**Sub Keg** (Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabuapaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Paket	117,049,500
1.06.07.2.01.02	**Sub Keg** (Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota)	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	57,339,373
1.06.07.2.01.03	**Sub Keg** (Pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupatenkota)	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**22.040.184.016,00**							**22.476.649.649,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.040.184.016,00**							**22.476.649.649,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**22.040.184.016,00**							**22.476.649.649,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	**-**			**100 %**	**4.761.154.311,00**						**-**	**5.167.047.788,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			15 Dokumen	45.879.008,00			-	-	-	-	45.879.008,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.806.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.806.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	7.076.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.076.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.076.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.076.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.876.258,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.876.258,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.044.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.044.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daeah*	-			100 %	2.535.076.846,00			-	-	-	-	2.901.947.434,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.535.076.846,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.901.947.434,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)*	-			100 %	21.697.250,00			-	-	-	-	21.697.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	21.697.250,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		21.697.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	20.350.000,00			-	-	-	-	20.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	20.350.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	277.108.829,00			-	-	-	-	279.809.829,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.350.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.998.179,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.998.179,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	11.990.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.990.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.938.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.938.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	34.999.150,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.999.150,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	9.927.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.927.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	17.010.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.711.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	107.896.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.896.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	-			100 %	613.151.669,00			-	-	-	-	634.473.558,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	152.278.111,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		168.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	155.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	255.873.558,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		255.873.558,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Laporan	830.327.105,00			-	-	-	-	830.327.105,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	104.373.614,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.373.614,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.453.491,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.453.491,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	-			100 %	417.563.604,00			-	-	-	-	432.563.604,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	234.538.554,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		249.538.554,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	11.944.284,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.944.284,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	11.501.831,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.501.831,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	45.301.774,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.301.774,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	44.277.161,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.277.161,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	70.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Fasilitasi KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial***	**-**			**100 %**	**839.782.136,00**						**-**	**839.782.136,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Sumbangan dalam daerah yang terkoordinir*	-			1 Kegiatan	35.034.875,00			-	-	-	-	35.034.875,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	35.034.875,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.034.875,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*SDM potensi sumber kesejahteraan sosial*	-			99 Orang	804.747.261,00			-	-	-	-	804.747.261,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	134.747.261,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		134.747.261,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Keluarga	170.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	430.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		430.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Sertifikat	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan***	**-**			**100 %**	**36.064.350,00**						**-**	**36.064.350,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang di pulangkan dari titi daerah kabupaten ke desa/kelurahan asal*	-			12 Bulan	36.064.350,00			-	-	-	-	36.064.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	36.064.350,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.064.350,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Cakupan rehabilitasi sosial***	**-**			**100 %**	**3.886.415.293,00**						**-**	**3.896.965.293,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial*	-			12 Bulan	1.041.295.830,00			-	-	-	-	1.041.845.830,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	57.823.612,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.823.612,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	56.008.674,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.008.674,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				523 Orang	337.555.219,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		337.555.219,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				122 Orang	161.237.848,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		161.237.848,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	64.493.887,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		64.493.887,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	52.075.075,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		52.075.075,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	34.042.900,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.042.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	17.169.084,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.169.084,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	35.669.867,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.669.867,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	96.729.664,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		96.279.664,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	72.969.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.969.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	55.520.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.520.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dilluar Panti Sosial*	-			12 Bulan	2.845.119.463,00			-	-	-	-	2.855.119.463,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	33.622.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.622.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	64.114.400,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		64.114.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	2.125.200.969,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.125.200.969,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	47.647.575,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.647.575,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				523 Orang	228.980.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		238.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	27.173.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.173.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	35.622.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.622.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	50.071.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.071.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	38.622.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.622.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	17.169.084,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		17.169.084,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	62.969.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.969.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				122 Orang	57.245.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.245.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	16.608.935,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		16.608.935,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				6 Dokumen	40.071.500,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.071.500,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial***	**-**			**66,98 %**	**11.446.775.356,00**						**-**	**11.446.797.512,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Terpenuhinya pemeliharaan anak-anak terlantar*	-			50 orang	181.165.542,00			-	-	-	-	181.165.542,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Orang	34.870.792,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.870.792,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Orang	61.617.946,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.617.946,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Orang	84.676.804,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.676.804,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan dan pemberian bantuan terhadap fakir miskin cakupan kabupaten/kota*	-			63.597 KK	11.265.609.814,00			-	-	-	-	11.265.631.970,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				63597 Orang	975.996.624,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		975.996.624,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				63597 Keluarga	339.319.222,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		339.319.222,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15240 Keluarga	9.551.101.557,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.551.101.557,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				76 Orang	399.192.411,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		399.214.567,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat***	**-**			**100 %**	**726.998.789,00**						**-**	**741.998.789,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			100 orang	646.998.789,00			-	-	-	-	661.998.789,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	193.500.029,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		208.500.029,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	167.211.706,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		167.211.706,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	115.373.863,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.373.863,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	57.245.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.245.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				107 Orang	113.668.191,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		113.668.191,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Cakupan pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana*	-			8 Orang	80.000.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				204 Kampung	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik***	**-**			**100 %**	**342.993.781,00**						**-**	**347.993.781,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Taman makam pahlawan kondisi baik*	-			2 paket	342.993.781,00			-	-	-	-	347.993.781,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	186.125.627,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		191.125.627,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	122.521.154,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		122.521.154,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	34.347.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.347.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**22.040.184.016,00**							**22.476.649.649,00**	